ANALISIS KESEJAHTERAAN PETANI TEBU RAKYAT PADA POLA KEMITRAAN YANG BERBEDA DI PROPINSI LAMPUNG

Dwi Haryono¹, Fitriani²

¹ Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung

² Dosen Program Studi Agribisnis Politeknik Negeri Lampung *e-mail: dwihunila@yahoo.com*

ABSTRACT

The goal of Agricultural revilatization in Indonesia concern on triple track strategy as progrowth, pro-employment and pro-poor development program for poverty avelliation. This main purpose of the research is analysis the sugarcane farmer's welfare with different partership pattern in Lampung Province. Method of the researc was survey. Central of Lampung and North of Lampung Regency were choosen as location of sugarcan's farmer. The 76 respondents determine by Sugiarto's formula. Data analysis by three criterias of poverty line such as Sayogyo's, Lampung's BPS, and World Bank's criteria. The result of research perform that there were part of sugarcane farmer's on transient poverty condition.

Key words: welfare, transient poverty, partnership pattern, sugarcane's farmer

I. PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor pertanian berkontribusi dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, pengentasan kemiskinan, perolehan devisa, penciptaan ketahanan pangan nasional, dan penciptaan kondisi yang kondusif bagi pembangunan sektor lain. Sektor pertanian juga menjadi sektor penting penggerak perekonomian Propinsi Lampung dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 43,2% pada tahun 2007.

Walaupun terdapat penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan sebagai wujud dari peningkatan investasi sektor pertanian, persoalan kemiskinan pertanian masih menjadi persoalan utama di Lampung. Hingga periode Maret 2010 jumlah penduduk miskin di Propinsi Lampung tercatat sebesar 1.479,9 ribu jiwa (18,94%). Meskipun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan terjadinya penurunan menjadi sebesar 1.558,3 ribu jiwa (20,22%). Sebagian besar penduduk miskin (77,58%) berada di daerah perdesaan (BPS Propinsi Lampung, 2010).

Kemiskinan perdesaan tidak terlepas dari kondisi produktivitas sektor pertanian dan tenaga kerja. Usahatani yang terfragmentasi dalam luasan yang sempit (petani gurem), penguasaan akses terhadap modal yang terbatas, dan kualitas sumberdaya petani, serta relatif rendahnya upah riil yang diterima menjadi faktor penyebab rendahnya produktivitas tenaga kerja perdesaan. Kurang berkembangnya kesempatan kerja dan rendahnya produktivitas kerja di sektor ekonomi perdesaan menjadi penyebab beralihnya tenaga kerja usia muda terdidik ke wilayah perkotaan.

Bentuk operasionalisasi konsep program pembangunan yang lebih pro-growth, proemployment dan pro-poor tiga jalur (triple track strategy) adalah revitalisasi pertanian dan perdesaan untuk pengentasan kemiskinan. Pertanian harus dilihat sebagai sektor yang multifungsi dan sumber kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Setiap elemen stakeholders yang terlibat dalam aktivitas sektor pertanian harus memiliki visi dan misi untuk memperbaiki kondisi ekonomi perdesaan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan pertanian.

Salah satu subsektor pertanian yang penting di Indonesia dan Lampung adalah perkebunan. Subsektor perkebunan memiliki potensi yang besar dalam upaya pembangunan ekonomi perdesaan, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan. Salah satu komoditas perkebunan yang berkontribusi penting adalah tebu. Pada saat ini, kontribusi utama luas areal tanaman tebu di Indonesia adalah Jawa Timur (43,29%), Lampung (25,71%), Jawa Tengah (10,07%), dan Jawa Barat (5,87%). Kajian Susila dan IDM (2007) tentang peran industri berbasis perkebunan dalam pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa perkebunan tebu mampu menyerap tenaga kerja dengan pangsa penyerapan mencapai 7,04% yang berarti sangat efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, demikian juga dengan industri hilir pengolahannya.

Perkebunan tebu rakyat secara umum masih menghadapi persoalan teknologi produksi, produktivitas, dan rendahnya rendemen gula yang dihasilkan. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh praktik pemanfaatan kembali ratoon secara berulang bahkan sampai belasan kali pada skala tebu rakyat, juga praktik penanganan hasil, dan ketidaktransparannya penentuan rendemen oleh pabrik gula. Selain itu, basis usahatani tebu semakin tergeser oleh komoditas lain, terutama padi, palawija dan hortikultura yang menghasilkan pendapatan ekonomi lebih tinggi (Arifin, 2008). Perkembangan usatani tebu rakyat di Propinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan luas areal dan produksi tebu rakyat di Propinsi Lampung, 20022006

No Tahun		Areal (ha)	Produksi Hablur (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	2002	5,613	10,870	1,94
2	2003	5,034	28,398	5,64
3	2004	6,651	15,904	2,39
4	2005	9,821	21,011	2,14
5	2006	8,185	47,618	5,82
Rata-rata		7.061	24.760	3,09
Pertumbuhan (%)		0,13	0,69	0,74

Sumber: BPS Propinsi Lampung, 2007

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa perkembangan luas areal perkebunan tebu rakyat di Propinsi Lampung rata-rata per tahun mencapai 7.061 ha dengan produksi mencapai 24.760 ton, serta produktivitas sebesar 3,09 ton/ha. Perkembangan luas areal, produksi, dan produktivitas tebu rakyat menunjukkan masih lebih rendah dari produksi potensialnya dan pertumbuhan rata-rata per tahun kurang dari 1% per tahun.

Produksi dan pendapatan usahatani tebu menjadi salah satu indikator keberhasilan petani dan pembangunan ekonomi perdesaan. Keberhasilan produksi dan pendapatan usahatani tebu sangat tergantung pada alokasi penggunaan input yang efisien pada tingkat harga yang menguntungkan atau tercapainya kondisi efisiensi ekonomis.

Berkembanganya usahatani tebu rakyat di perdesaan akan turut menunjang terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sebagai alternatif kegiatan dan sumber pendapatan masyarakat perdesaan/petani. Lebih lanjut, akan turut meningkatkan tingkat kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan masyarakat pertanian di perdesaan. Tingkat pendapatan petani dalam suatu wilayah dapat menjadi landasan pengkajian secara mendalam kondisi kesejahteraan dan kemiskinan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesejahteraan petani tebu pada pola kemitraan dengan PG BUMN dan swasta di Propinsi Lampung.

II. METODE PENELITIAN

Penentuan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan kondisi pengembangan tebu rakyat di Propinsi Lampung. Pemilihan daerah pengembangan tebu dilakukan berdasarkan tipe pengusahaan perusahaan tebu, yaitu pengusahaan perusahaan (private estate) (PT Gunung Madu Plantation) dan pengelolaan tebu milik BUMN (PTPN VII). Kecamatan

Muara Sungkai dan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara menjadi lokasi petani tebu rakyat mitra PTPN VII. Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah menjadi lokasi petani tebu rakyat mitra mandiri PT GMP. Waktu pelaksanaan penelitian adalah bulan Agustus 2009 sampai Maret 2010. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode acak sederhana (simple random sampling). Penentuan jumlah sampel responden dilakukan dengan menggunakan formula Sugiarto, dkk (2003). Berdasarkan perhitungan diketahui jumlah total sampel petani tebu sebanyak 75 petani (secara proporsional masing-masing sejumlah 38 responden).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan beberapa kriteria kimiskinan, masih terdapat petani tebu dalam kategori miskin. Kriteria kemiskinan yang digunakan meliputi Sayogyo, BPS Propinsi Lampung (2010), dan Bank Dunia. Berikut ini sebaran persentase jumlah petani tebu berdasarkan masing-masing kriteria tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Persentase (%) petani tebu rakyat berdasarkan berbagai kriteria

Kelompok	Sayogyo (**) (320 kg/kap/th setara Rp 160.000/kap/bl)	BPS*) (Rp 202.414/kap/bl)	Bank Dunia**) (1US\$ setara Rp 285.000/kap/bl)
Petani Mitra PTPN VII	23,68	26,32	42,11
Petani mitra mandiri	13,16	15,17	39,47

^{*)} BPS Propinsi Lampung, 2010

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa terdapat sebagian petani tebu rakyat yang masuk ke dalam kriteria yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkatan batas kriteria yang diterapkan, persentasi jumlah petani juga semakin besar. Kondisi lebih baik ditunjukan oleh petani mitra mandiri bila dibandingkan petani mitra PTPN. Hal ini antara lain karena kepemilikan lahan dan terbukanya akses terhadap sumber-sumber pendapatan di luar usahatani tebu menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan antar kelompok tersebut.

Bila dilihat dari rata-rata tingkat pendidikan petani mitra PTPN VII rata-rata pendidikan dasar, sedangkan petani mitra mandiri rata-rata telah menyelesaikan pendidikan

^{**)} Haryono (2008)

menengah. Persebaran pendidikan yang berkualitas, merupakan kebijakan yang diharapkan untuk mengatasi persoalan kesenjangan kemiskinan. Perbaikan mutu pendidikan menjadi hal mutlak yang diperlukan.

Penyebab kemiskinan antar kelompok juga dimungkinkan karena setiap daerah mempunyai kondisi tersendiri baik kondisi alam atau geografis, kondisi perekonomian, kondisi sarana dan prasarana, kondisi adat istiadat yang berbeda dan lain-lain. Menurut Thorbecke dan Pluijm (1993) kemiskinan banyak dijumpai di perdesaan dan sangat berhubungan dengan: (a) pola kepemilikan lahan dan produktivitas lahan, (b) struktur kesempatan kerja, dan (c) operasi pasar tenaga kerja. Juga disebutkan bahwa Individuindividu dari berbagai golongan rumah tangga mempunyai perbedaan dalam hal anugerah sumberdaya yang diterima, khususnya penguasaan lahan (land endowment) dan modal manusia (human capital). Hal ini berarti terdapat korelasi yang tinggi antara standar hidup dengan jumlah dan kualitas lahan yang dimiliki, serta korelasi antara standar hidup dengan tingkat pendidikan dan keahlian anggota rumah tangga. Dengan demikian, suatu rumah tangga yang tergolong tidak memiliki lahan dan dengan tingkat pendidikan serta keahlian yang terbatas, jika tidak menerima bantuan dan transfer pendapatan dari pihak lain, maka rumah tangga tersebut akan cenderung terus tenggelam dalam kemiskinannya.

Berdasarkan hasil perhitungan *Theil index* menunjukkan nilai T dalam kelompok sebesar 0,06 dan 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa baik petani mitra PTPN VII maupun mitra mandiri PT GMP relatif menunjukkan adanya pemerataan atau dengan kata lain tidak menunjukkan adanya ketimpangan dalam kelompok. Nilai T = 0 berarti menuju pemerataan yang sempurna. Sementara itu, nilai *entropy* T sebesar 0,33 dan 0,36 relatif lebih besar dibandingkan nilai T dalam kelompok. Kondisi ini senada dengan hasil penelitian Wijayanti dan Wahono (2005) tentang konsentrasi kemiskinan di Indonesia tahun 19992003 yang menunjukkan adanya kesenjangan yang relatif besar antar pulau di Sumatera dengan nilai *entropy* T (0,3690).

Secara umum, kondisi tersebut di atas menggambarkan bahwa sebagian dari petani tebu masuk ke dalam kriteria kurang sejahtera atau dapat diistilahkan berada pada kemiskinan sementara (transient proverty). Hal ini antara lain karena petani tebu rakyat umumnya sering menghadapi situasi penurunan tingkat pendapatan sebagai akibat perubahan siklus ekonomi, krisis energi, perdagangan global yang berpengaruh terhadap tingkat harga beli gula petani.

Informasi tentang harga beli gula petani dan penentuan rendemen relatif tidak dapat secara terbuka diperoleh petani dari mitra pabrik gulanya. Konsekuensinya petani sebagai penerima harga sering tidak mendapatkan tingkat penerimaan dan pendapatan yang menguntungkan dari usahatani tebu yang dilakukannya. Belum lagi faktor eksternal yang secara kuat turut mempengaruhi tingkat harga jual gula petani.

Petani dihadapkan pada resiko dan ketidakpastian. Selain mengahadapi ketidakpastian faktor alam, resiko makin meningkatnya harga-harga input maupun fluktuasi harga produksi juga menjadi persoalan. Besarnya fluktuasi harga dapat ditafsirkan sebagai tingkat resiko pendapatan yang dihadapi petani dari komoditas yang diusahakan, disisi lain mencerminkan resiko terhadap daya beli yang harus dihadapi oleh masyarakat konsumen. Pada situasi tersebut di atas, tingkat harga jual gula yang diterima petani sangat tergantung pada pengelolaan pabrik gula yang efisien serta kondisi pasar gula nasional/internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga gula di tingkat konsumen berpengaruh positif dan nyata terhadap harga gula di tingkat petani (Hariyati, 2007). Meskipun pada praktiknya, harga gula domestik menunjukkan adanya proteksi dengan maksud untuk memberikan keuntungan privat bagi produsen gula, namun biasanya petani tebu rakyat tidak dapat menikmatinya.

Kemiskinan secara ekonomi sebagaimana tersebut di atas pada prinsipnya dapat diatasi dengan pemenuhan kebutuhan praktis seperti penciptaan lapangan kerja yang berbasis kerakyatan, pengembangan agribisnis, dan agroindustri dengan basis sumberdaya lokal, pembangunan infrastruktur, dan penguatan lembaga-lembaga sosial masyarakat (Daryanto dan Hafizrianda, 2010). Pada kasus yang dihadapi petani tebu rakyat berbagai upaya yang perlu dilakukan antara lain melalui penguatan kelembagaan petani tebu rakyat dan memperbaiki sinergi dan kinerja kerjasama kemitraan dengan pabrik gula. Tentu saja persoalannya tidak akan sederhana. Perlu kerja keras dan langkah perjuangan panjang untuk memastikan segenap stakeholders industri gula, termasuk di dalamnya adalah petani tebu, PG, asosiasi pedagang gula, pemangku kekuasaan, dan pihak-pihak lain yang terlibat secara bertanggung jawab, terencana, sistematis, dan terstruktur memperbaiki kondisi kesejahteraan petani tebu rakyat sebagai mitra sejajar.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Beberapa hal sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah:

 Sebagian petani tebu masih menghadapi kondisi kesejahteraan yang belum memadai atau masuk dalam kategori kemiskinan sementara (transient poverty) sebagai akibat adanya perubahan kondisi ekonomi secara umum. Kemiskinan sementara (transient poverty) petani tebu rakyat merupakan kemiskinan secara ekonomi. Oleh karenanya pengentasan persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai upaya perbaikan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi secara integral melibatkan segenap stakeholders industri gula nasional.

Saran

- Pemenuhan kebutuhan praktis seperti penciptaan lapangan kerja yang berbasis kerakyatan, pengembangan agribisnis, dan agroindustri dengan basis sumberdaya lokal, pembangunan infrastruktur, dan penguatan lembaga-lembaga sosial masyarakat merupakan hal prioritas yang perlu dilakukan oleh penentu kebijakan untuk dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan ekonomi yang dihadapi oleh petani tebu rakyat.
- Penguatan kelembagaan petani tebu rakyat dan perbaikikan sinergi dan kinerja kerjasama kemitraan dengan pabrik gula secara bertanggung jawab, terencana, sistematis, dan terstruktur penting dilakukan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan petani tebu rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul. 2005. Kebijakan Pertanian. Buku Ajar. Universitas Lampung Press. Bandar Lampung.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung. 2008. Lampung Dalam Angka. Bandar Lampung.
- Daryanto, Arief dan Hafizrianda, Yundy. 2010. Model-Model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Daerah. Konsep dan Aplikasi. PT Penerbit IPB Press. Bogor.
- ______. 2010. Analisis Input-Output dan Social Accounting Matrix untuk Pembangunan Ekonomi Daerah. PT Penerbit IPB Press. Bogor.
- Haryono, Dwi. 2008. Dampak Industrialisasi Pertanian terhadap Kinerja Sektor Pertanian dan Kemiskinan Perdesaan: Model CGE Recursive Dynamic. Disertasi. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
- Hariyati, Yuli. 2007. Performansi Perdagangan Beras dan Gula di Indonesia pada era Liberalisasi Perdagangan. Proseding Konperensi Nasional ke XV PERHEPI. Brighten Press. Bogor.
- Hayami, Yujiro. 2001. Development Economic. Oxford University Press. Inc. New York.
- Susila, Wayan R dan IDM Darma Setiawan. 2007. Peran Industri Berbasis Perkebunan dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerintaan. Jurnal Agro Ekonomi. Vol. 25, No. 2, Oktober 2007.
- Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Widodo, Suseno Triyanto. 1990. Indikator Ekonomi dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Wijayanti, Diana dan Wahono, Heri. 2005. *Analisis Konsentrasi Kemiskinan di Indonesia Tahun 19992003*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10 No. 3, Desember 2005.